

IMPLIKASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR BAGI PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Mochamad Nursalim
Universitas Negeri Surabaya
Email: mochamadnursalim@unesa.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi kebijakan merdeka belajar bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Upaya identifikasi implikasi ini dimaksudkan agar para guru bimbingan dan konseling lebih mudah berperan dan merancang pelaksanaan bimbingan dan konseling yang sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka. Penulisan artikel ini menggunakan metode *review* literatur, pada metode ini dilakukan proses pengumpulan dan seleksi artikel, pencermatan dan analisis, serta penyajian hasil. Melalui Pembahasan dalam artikel ini dapat disimpulkan 1) Sampai artikel ini ditulis, sudah dirilis oleh kemendikbud 19 episode kebijakan merdeka belajar, terdapat empat episode kebijakan merdeka belajar yang berpengaruh dan berimplikasi pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, yaitu episode 1, 5, 7, 15. 2) Implikasi kebijakan merdeka belajar terwujud pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan bimbingan dan Konseling. Rekomendasi yang diajukan adalah. 1) Guru BK selalu mengikuti perkembangan kebijakan merdeka belajar yang episodenya selalu bertambah. 2) Guru BK/ Konselor diharapkan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebijakan merdeka belajar.

Kata kunci: *Implikasi, Guru BK, kebijakan, merdeka belajar, layanan BK*

ABSTRACT

This article aims to describe the implications of the independent learning policy for the implementation of guidance and counseling services. This implication identification effort is intended to make it easier for guidance and counseling teachers to play a role and design the implementation of guidance and counseling in line with the implementation of the independent curriculum. The writing of this article uses the literature review method. In this method, the process of collecting and selecting articles, observing and analyzing, and presenting the results is carried out Through the discussion in this article, it can be concluded: 1) Until this article was written, 19 episodes of the independent learning policy had been released by the Ministry of Education and Culture, there were four episodes of the independent learning policy that had an impact on and had implications for the implementation of guidance and counseling services, namely episodes 1, 5, 7, 15. 2) The implications of the independent learning policy are manifested in the planning, implementation and evaluation of guidance and counseling services. The recommendations put forward are: 1) Guidance and counseling teachers always follow the development of free learning policies whose episodes are always increasing. 2) Guidance and counseling teachers /Counselors are expected to design, implement and evaluate guidance and counseling services in accordance with the independent learning policy.

Keywords: *Implications, teachers counselor, policies, independent learning, guidance and counseling services*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini kebijakan Merdeka belajar kampus Merdeka terus bergulir, bahkan saat artikel ini ditulis sudah ada sembilan belas (19) episode kebijakan merdeka belajar yang telah dirilis oleh Kemendikbudristek (Sakarinto, 2022). Munculnya kebijakan merdeka belajar dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang pendidikan dan dalam mewujudkan kemerdekaan dalam berfikir (Arifin, 2021). kebijakan merdeka belajar yang berjumlah 19 menyangkut berbagai macam kebijakan dalam bidang pendidikan, Kesembilan belas kebijakan tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Sakarinto, 2022): 1) Asesmen Nasional, USBN, RPP dan PPDB, 2) Kampus Merdeka, 3) Penyaluran dan Penggunaan Dana Bos, 4) Program Organisasi Penggerak, 5) Guru Penggerak, 6) Transformasi Dana Pemerintah untuk PT, 7) Program Sekolah Penggerak, 8) SMK Pusat Unggulan, 9) KIP Kuliah Merdeka, 10) Perluasan Program Beasiswa LPDP, 11) Kampus Merdeka Vokasi, 12) Sekolah Aman berbelanja dengan SIPLah, 13) Merdeka berbudaya dengan kanal Indosiana, 14) Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, 15) Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar, 16) Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, 17) Revitalisasi Bahasa Daerah, 18) Merdeka berbudaya dengan dana Indonesiana, 19) Rapor Pendidikan Indonesia.

Munculnya kebijakan merdeka belajar menimbulkan berbagai reaksi, Hadi (2020) mencoba mengidentifikasi pro dan kontra kebijakan merdeka belajar, ada yang mendukung kebijakan merdeka belajar dan menyatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan solusi bagi masalah yang begitu rumit di Sekolah (Hendri, 2020). Pihak yang kontra menyatakan salah satu kebijakan merdeka belajar tentang PPDB Zonasi dapat menimbulkan siswa tidak memperoleh sekolah yang dikehendaki dan Ada siswa yang tidak terakomodasi, tidak diterima di sekolah manapun.

Terlepas dari pro dan kontra, hadirnya kebijakan merdeka belajar juga berimplikasi bagi banyak kegiatan di pembelajaran dan pendidikan. Suyanto (2020) mengkaji implikasi kebijakan merdeka belajar, menurutnya, Kebijakan Merdeka Belajar merupakan skenario perubahan pendidikan yang signifikan dan mendasar dibandingkan dengan praktik pendidikan selama ini. Perubahan pendidikan menyangkut aspek sistem makro, mikro, dan meso. Anwar (2022) implikasi kebijakan merdeka belajar diantaranya beban guru menjadi berkurang karena penyederhanaan RPP, guru bebas berekspresi dan mengkreasi pembelajaran yang menyenangkan, terjadi kemerdekaan guru dan murid.

Di antara 19 episode merdeka belajar yang telah dirilis oleh Kemendikbudristek, ada beberapa episode yang terkait dan berimplikasi dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan

konseling di sekolah. Tulisan ini akan mengupas implikasi kebijakan merdeka belajar bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di Sekolah. Implikasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah apa yang di yakini akan terjadi, atau mungkin akan terjadi seiring dengan terbitnya kebijakan merdeka belajar bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode revid literatur/ melakukan revid terhadap berbagai tulisan artikel/ dokumen/ file yang terkait dengan kebijakan merdeka belajar. Data primer penulisan ini adalah 19 episode kebijakan merdeka belajar yang diterbitkan/ disosialisasikan Kemendikbudristek, baik itu yang berupa dokumen PPT, pdf dan lain-lain. Sementara data sekunder berupa tulisan pada jurnal ilmiah, tulisan di koran serta dokumen lain.

PEMBAHASAN

Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar Bagi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling

Pada peringatan hari guru tahun 2019, Mendikbud mencanangkan Program Merdeka Belajar, program ini merupakan program baru, yang diharapkan sebagai upaya mendongkrak peningkatan daya saing lulusan di tingkat lokal dan global (Arifin, 2021). Hal yang sangat penting dari program baru tersebut adalah Mas Nadiem, selaku Menteri akan mewujudkan di Indonesia suatu kondisi Kemerdekaan belajar Nasution (2020). Kemerdekaan belajar akan diwujudkan dalam kemerdekaan berpikir dan berinovasi pada guru, yang selanjutnya kemerdekaan berpikir ini akan mengilhami dan menginspirasi para murid untuk berfikir secara merdeka Hendri (2020).

Atas dasar gagasan merdeka belajar yang telah dicanangkan, Kemdikbudristek mengaktualkan dalam bentuk episode-episode kebijakan. Sejak dicanangkan sampai bulan Mei 2022, Kemdikbudristek telah merilis 19 episode kebijakan merdeka belajar. Kesembilan belas episode kebijakan merdeka belajar yang telah dirilis secara komprehensif diharapkan dapat menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan yang ada saat. Bila dikaji lebih dalam ke sembilan belas episode kebijakan telah mencakup berbagai aspek diantaranya, berisi kebijakan untuk semua jenjang pendidikan yaitu dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, meliputi input, proses, output serta outcome.

Sejalan dengan kebijakan Mendikbud tentang Merdeka belajar, guru BK perlu segera menyikapi dan berperan dalam mensukseskan implementasi program tersebut. Upaya

menyikapi dan segera mengambil peran ini penting untuk dilakukan agar ekspektasi kinerja guru BK semakin diakui sejajar dengan profesi lain yang lebih mantap.

Untuk dapat berperan dengan lebih baik maka guru BK perlu memahami lebih detail dan mendalam berbagai landasan peraturan, hakekat merdeka belajar serta petunjuk pelaksanaan program merdeka belajar. Selanjutnya secara bersama-sama merumuskan peran yang dapat dilakukan oleh guru BK.

Beberapa ahli telah merumuskan peran guru BK/ konselor sekolah diantaranya Shertzer & Stone, (1981); Barruth dan Robinson (1987); Gibson & Mitchell (2011). Bila dirangkum maka peran guru BK menurut para ahli tersebut adalah sebagai sebagai agen perubahan, sebagai agen pencegahan, sebagai pengembang karir, sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai koordinator, sebagai asesor.

Peran-peran yang telah dirumuskan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan oleh guru BK dalam mensukseskan implementasi program merdeka belajar. Di bawah ini diidentifikasi berbagai peran dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru BK dalam mensukseskan kegiatan dalam program merdeka belajar. Pertama, pada kebijakan sistem PPDB zonasi, akan muncul berbagai masalah, diantara masalah tersebut yang dapat dibantu oleh guru BK adalah ada siswa yang tidak terakomodasi oleh sistem zonasi, siswa tidak diterima di sekolah manapun dikarenakan lokasi tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Pada kasus semacam ini, guru BK dapat berperan sebagai terapistik atau konselor yang memberi pendampingan dan bersama dengan siswa dan orang tua siswa mencari solusi agar siswa dapat tetap mendapat sekolah. Selain itu, guru BK berperan sebagai agen pencegahan agar PPDB sistem zonasi ini tidak menimbulkan masalah yaitu dengan cara memberikan informasi tentang PPDB Zonasi. Peran lainnya adalah memberi pendampingan terhadap kemampuan siswa yang kurang memadai yang diakibatkan oleh penerimaan siswa baru didasarkan pada jarak rumah ke sekolah. Pada tabel di bawah ini dimuat kebijakan atau strategi utama merdeka belajar, permasalahan yang muncul, peran guru BK serta kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan peran tersebut.

Kebijakan Merdeka Belajar	Uraian	Implikasi Bagi Pelayanan Layanan BK
Cita-cita kebijakan Merdeka belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Berkualitas bagi Seluruh rakyat Indonesia. Fokus pada pengembangan Kompetensi Dasar dan Karakter 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan langsung dan tak Langsung difokuskan pada peningkatan penguasaan pengembangan kompetensi dan karakter
Capaian Merdeka Belajar	Profil Pelajar Pancasila: Mandiri, Berfikir kritis, Kreatif, Gotong royong Kebinekaan global, Beriman,	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian, berfikir kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, keimanan dan ketaqwaan, serta akhlak mulia menjadi materi utama layanan dan tujuan layanan BK

Kebijakan Merdeka Belajar	Uraian	Implikasi Bagi Pelayanan Layanan BK
	bertaqwa kepada tuhan YME dan berakhlak Mulia	
Program Sekolah Penggerak	Pendampingan konsultatif dan Penguatan SDM Sekolah Pembelajaran Kompetensi Holistik (Perencanaan Berbasis Data Digitalisasi Sekolah)	<ul style="list-style-type: none"> Guru BK ikut mendaftar dan terlibat Program guru penggerak serta Mendukung kegiatan Program Sekolah Penggerak
Transformasi Sekolah	Diharapkan pada tahap 4: Aman, Nyaman, inklusif dan menyenangkan Berpusat pada siswa Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi <ul style="list-style-type: none"> Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan 	Mendukung suasana sekolah Aman, Nyaman, inklusif dan menyenangkan Berpusat pada siswa Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri Refleksi guru BK dan perbaikan pelayanan terjadi Guru BK dan kepala sekolah melakukan pengimbasan
Sistem zonasi PPDB	Input lebih beragam, perlu pendampingan khusus Ada siswa yang tidak terakomodasi, tidak diterima di sekolah manapun	Pendampingan pada siswa yg tak terakomodasi/ tak dapat sekolah Pemantauan dan pendampingan pada input yg kurang memadai Pemberian informasi ttg sistem zonasi PPDB Pemberian konseling
Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survey karakter	Literasi dan numerasi rendah Karakter belum menggambarkan profil pelajar pancasila	Menjadi koordinator survey karakter Pemberian informasi ttg karakter dan asesmen karakter Pemberian pelatihan tentang membaca skimming, scanning Pemberian pelatihan penguasaan literasi dan numerasi pelatihan berfikir kritis, pengembangan kreativitas, literasi media
Penyederhanaan RPP/ RPL	RPL belum 1 lembar	Mengikuti pelatihan dan deseminasi hasil pelatihan
Membangun Platform Pend. berbasis Teknologi	Pelaksanaan BK belum berbasis platform teknologi	Mengembangkan e-lbk Fasilitator kegiatan BK secara online Menjadi konten creator ttg BK
Membangun sekolah masa depan yang aman dan eksklusif, kesejahteraan hidup (wellbeing) siswa	Ada sekolah yg tidak ramah anak Masih banyak terjadi bullying	Mendukung sekolah Ramah anak, penanganan bullying
Heutagogi (self Determinate Learning)	Siswa belum terbiasa menentukan target belajar sendiri	Memberi informasi dan pelatihan ttg heutagogi Pemberian konseling pada siswa belum terbiasa menentukan target belajar sendiri
Guru Pengerak	Belum banyak guru BK yg terlibat menjadi guru penggerak	Mengikuti program guru penggerak
Pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat pada siswa	Berbasis kebutuhan secara umum	Melaksanakan perencanaan individual dan peminatan

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Implikasi kebijakan merdeka belajar terwujud pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan bimbingan dan Konseling.
- b. Guru Bk memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar, bahkan kegiatan yang dilakukan guru BK berupa layanan BK merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar.

SARAN

Berdasarkan simpulan direkomendasikan sebagai berikut.

- a. Guru BK selalu mengikuti perkembangan kebijakan merdeka belajar yang episodenya selalu bertambah.
- b. Guru BK/ Konselor diharapkan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebijakan merdeka belajar.
- c. Guru BK/ Konselor selalu update perkembangan kebijakan merdeka belajar yang berkaitan dengan layanan BK.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Fathul. (2022). Kebijakan merdeka belajar dan implikasi pada pendidikan agama islam sebuah analisis. AR-RAHMAH Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Keagamaan e- ISSN: 2797-3808 Volume 1, Edisi 1 (Januari 2022), www.ejournal.pergunutjb.ac.id
- Arifin, Syamsul Nurul Abidin, Fauzan Al Anshori. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Vol. 7, No. 1, Juni 2021. Hal. 65-78. ISSN (Online): 2550-1038, ISSN (Print): 2503-3506.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan dan Perbukuan. (2020). Asesmen Nasional: AKM, Survey Karakter dan Lingkungan Belajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Barruth, L.G dan Robinson, E. H. (1987). An Introduction To The Counseling Profession. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar, Antara Retorika dan Aplikasi. E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan, 08(01). Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/e-tech/article/download/107288/pdf>.
- <https://suyanto.id/implikasi-kebijakan-merdeka-belajar/> Tulisan ini terbit pertama di Harian Kompas edisi 8 Februari 2020.

- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>
- <https://www.muslimahnews.com>. Diakses tanggal 2020-01-16. Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-lompat ala Nadiem Makarim –Belajar melalui Empat Pokok Kebijakan Baru di Bidang News".
- Kemendikbudristek. (2022). Merdeka Belajar episode Kelima; guru penggerak, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2022). Transformasi Sekolah dan Pendidikan Daerah dalam kerangka Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Jakarta: Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2022). Transformasi Sekolah dan Pendidikan Daerah dalam kerangka Merdeka Belajar, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Lukman Hadi. (2020). Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 6, No.4, Desember 2020. e-ISSN:2089-5364p-ISSN:2622-8327DOI:10.5281/zenodo.4302861
- Ningsih, Widy. (2019). Merdeka belajar melalui Empat Pokok Kebijakan Baru di Bidang Pendidikan, *Suara Guru Online*. Diakses tanggal 17 November 2020.
- Nofri Hendri. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika Dan Aplikasi. Jurnal, *E-Tech*, Volume 08 Number 01 2020ISSN: Print 2541-3600– Online2621-7759. DOI: 10.1007/ XXXXXX-XX-0000-00
- Nursalim, Mochamad. (2013). Optimalisasi Peran Konselor /Guru Bimbingan Dan Konseling. *Makalah* disajikan dalam Pelatihan Guru BK di Bangkalan tanggal 20 Desember 2011.
- Nursalim, Mochamad. (2015). *Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Erlangga.
- Nursalim, Mochamad. (2015). Peningkatan Peran dan Kinerja Konselor untuk Pemberdayaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Prosiding *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling PD ABKIN Jatim*, tanggal 8 Februari 2015.
- Nurwardani, Paristiyanti. (2020). Landasan Filosofis dan Arah Implementasi Praktis Kebijakan Kampus Merdeka. Jakarta:Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Sakarinto, Wikan. (2022). Sinergi dan Kolaborasi dalam Revitalisasi dan Transformasi Pendidikan Vokasi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Samsuri. (2021). Kebijakan Dan Program. Prioritas Merdeka Belajar, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.